

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	1
Ikhtisar Eksekutif	2
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Grafik	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 6
A. Latar Belakang	6
B. Tugas Pokok dan Fungsi	7
C Sarana dan Prasarana	11
D Isu Strategis	13
 BAB II	
A Perencanaan Kinerja	18
1. Visi dan Misi	18
2. Tujuan dan Sasaran	20
B Indikator Kinerja Utama	19
C Perjanjian Kinerja	20
.....	
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 22
A Capaian Kinerja Organisasi	22
B Analisa Capaian Kinerja Persasaran	23
 BAB IV	 38

Daftar Tabel

BAB I	11
Tabel 1.1 Jumlah ASN Lingkup BPKD	11
Tabel 1.2 Jumlah Saranan dan Prasarana	11
Tabel 1.3 Laporan Realisasi PAD TA. 2018	15
Tabel 1.3.1 PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah	15
Tabel 1.4 Laporan Realisasi Belanja Daerah TA. 2018	16
Tabel 1.4.1 Belanja Langsung dan Tidak Langsung	
BAB II	18
Tabel 2.1 Misi, Tujuan dan Sasaran	18
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama	19
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja	20
Tabel 2.4 Sasaran 1 sinkronisasi dengan RPJMD	20
Tabel 2.5 Program yang mendukung Tujuan BPKD	21
BAB III	22
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Organisasi	22
Tabel 3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran 1	23
Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran 2	23
Tabel 3.2.3 Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Tahun Lalu	24
Tabel 3.2.3.1.1 Sasaran 1 dan Indikator 1	25
Tabel 3.2.3.1.2 Sasaran 1 dan Indikator 2	27
Tabel 3.2.1.2 Sasaran 2 dan Indikator 1	28

Daftar Grafik

BAB I	16
Grafik 1.3.1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah	16
Grafik 1.4.1 Grafik Belanja Langsung dan Tidak Langsung	17

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, maka diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan tertib, efektif dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyusunan Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018, merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja

LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap capaian target kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Oleh karena itu materi LAKIP disajikan secara obyektif dan transparan yang menyangkut tugas, fungsi dan program kerja serta kegiatan, sebagai bagian dari upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam membantu Kepala Daerah dalam hal ini melalui Sekretaris Daerah untuk mengelola keuangan daerah.

Dengan LAKIP Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 semoga dapat bermanfaat untuk dilingkungan Seretaris Daerah pada umumnya dan lingkungan BPKD Kabupaten Pesisir Selatan pa da khususnya dalam mengevaluasi kinerja dan mengantisipasi kendala/ hambatan yang terjadi dimasa akan datang dalam menyusun LAKIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang mempunyai tujuan menyampaikan pertanggungjawaban kinerja, tujuan dan sasaran strategis, realisasi pencapaian Perjanjian Kinerja serta penjelasan atas pencapaian kinerja. Selain itu penyusunan LAKIP juga menjadi salah satu upaya mendorong capaian kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan layanan publik.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam rencana Strategis BPKD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 mengacu pada Visi 1 (Pertama) Kepala Daerah tahun 2016 – 2021 yaitu :

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Madiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera”

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di BPKD Kabupaten Pesisir Selatan dapat diidentifikasi program kegiatan yang termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah
2. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Laporan Kinerja Badan pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan selain menyajikan keberhasilan capaian kinerja strategis selama Tahun Anggaran 2018 juga menyajikan permasalahan yang menjadi kendala/hambatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Pada tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 2 (dua) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja yang di gambarkan dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Tahun 2018
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baik	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD	Setiap Bulan Desember	28 Desember 2018
		Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %
2.	Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah Taat Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	85 %

Adapun 3 (Tiga) indikator kinerja beserta capaian kinerjanya dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Ketepatan penyusunan dokumen RAPBD waktu, bahwa proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 pada Tahun 2017 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian secara bersama – sama pihak eksekutif dan legislative menyetujui Rancangan APBD Tahun 2018 pada Tanggal 27 November 2017 kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 09 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 telah sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Adapun APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.606.031.734.100

2. Persentase laporan keuangan SKPD Lingkup Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 45 SKPD sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan SKPD kemudian dikomplikasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan menjadi bagian dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
3. Persentase SKPD taat aturan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mana dari 45 SKPD yang telah melaksanakan Penatausahaan Pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebanyak 39 SKPD atau 85 % dari SKPD yang ada lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengelolaan Barang Milik Daerah secara benar dan taat aturan merupakan salah satu syarat untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, dan Laporan Barang Milik Daerah akan mencerminkan kondisi kekayaan daerah yang dimanfaatkan untuk operasional perangkat daerah guna mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) N comor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana diwajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan berdasarkan perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi termasuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pertanggungjawaban tersebut diatas selanjutnya disampaikan oleh masing-masing instasi pemerintah termasuk Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. diharuskan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kepala Daerah dan kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berwenang.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah, tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dalam Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk didalamnya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai fungsi sebagai pelayanan umum bidang pemerintahan umum, sedangkan sebagai Pengelolaan Keuangan berfungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dalam kapasitasnya sebagai PPKD bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2. Kepegawaian dan Tupoksi Eselon II dan III

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang dibentuk dengan Peraturan Bupati, tentang Pembentukan Tata kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan termasuk didalamnya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2016, Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Stuktural Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah Perangkat Daerah melaksanakan fungsi Penunjang Keuangan, sedangkan sebagai Pengelolaan Keuangan berfungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dalam kapasitasnya sebagai PPKD bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

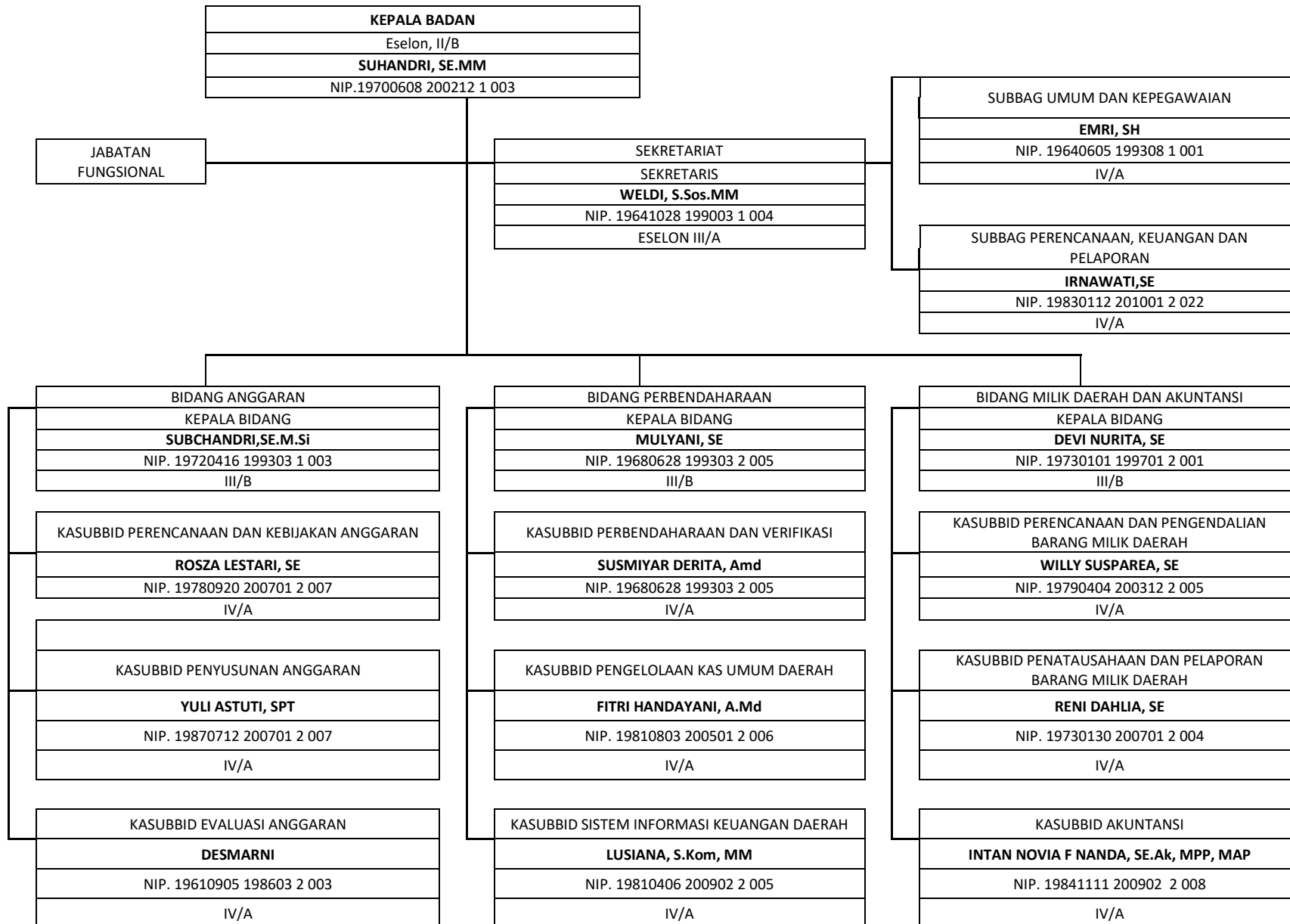
Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2016 Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Tugas dan Fungsi

- 1) Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otomomi dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada point 1 , Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang , pengelolaan keuangan dan asset daerah.
 - Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.
 - Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.
 - Pembinaan unit pelaksana teknis, Badan Pengelola Keuangan Daerah.
 - Penggunaan anggaran dinas;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah dan wewenang

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah dan wewenang sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 46 Tahun 2016, Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan dan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (Tiga) Bidang, Sekretariat dibantu 2 (dua) Sub Bagian dan Bidang dibantu 3 (Tiga) Seksi.

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas :

a. Kepala Badan.

b. Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

c. Bidang - bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :

1. Bidang Anggaran, membawahi :

- a) Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran;
- b) Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
- c) Sub Bidang Evaluasi Anggaran.

2. Bidang Perbendaharaan membawahi :

- a) Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi;
- b) Sub Bidang Pengelolaan Kas Umum Daerah; dan
- c) Sub Bidang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

3. Bidang Barang Milik Daerah dan Akuntansi, membawahi:

- a) Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah;
- b) Sub Bidang Penatusahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
- c) Sub Bidang Akuntansi.

Jumlah Aparatur Sipil Negara Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2018 adalah sebanyak 33 orang :

Tabel. 1.1
Jumlah ASN Lingkup BPKD

No	Golongan	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin
1.	III	S2	7 orang	3 (L) dan 4 (P)
	III	S1	11 orang	4 (L) dan 7 (P)
	III	D3	2 orang	2 (P)
	III	SMA	1 orang	1 (P)
2.	II	SMA	12 orang	7 (L) dan 5 (P)

1.3 SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan serta program dan kegiatan yang dilaksanakan maka Kantor BPKD Kabupaten Pesisir Selatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kenyamanan kerja yang menganut azas ergonomis, menuju pada konsep hemat kertas (*paperless office*) dan ramah lingkungan. Sarpras tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3 dibawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah Sarana dan Prasarana Lingkup BPKD

NO	JENIS	UNIT
A	Kendaraan Operasional	
1.	Kendaraan Roda 4	3
2	Kendaraan Roda 2	25
B	Alat kantor dan Rumah Tangga	
1.	AC	28
2.	Laptop	75

3.	Personal Komputer	33
4.	Printer	60
5.	Kursi Rapat	185
6.	Kursi eselon II	1
7.	Kursi eselon III	5
8.	Kursi eselon IV	15
9.	Server	4
10.	Kursi tamu	7 set
11.	TV	5
12.	Almari besi	17
13.	Brankas	2
14.	Almari kayu	14
15.	Stabilizer	32
16.	Meja	81
17.	Infocus	3
18.	Warles	2
19.	Dispenser	3
20.	Kulkas	1
21.	Filling cabinet	17
22.	Mesin penghancur	3

23.	Aipad	10
24.	Camera	2
25.	Handicam	1
26.	Fexsimil	1
27.	Mesin absensi	2
28.	Pingger look	3

1. ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/ PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

A. ISU-ISU STRATEGIS

1. Belum optimalnya layanan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu
2. Belum tertatanya manajemen aset daerah
3. Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan , penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan
4. Kurangnya koordinasi, kerjasama dan kemitraan antar perangkat daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan desa dan kecamatan
5. Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan daerah.

B. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Bagian ini akan menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai kondisi riil yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan terutama di BPKD Kabupaten Pesisir Selatan dimana pada saat ini ada beberapa kebijakan baru dari pemerintah pusat yang harus segera diakomodir, disosialisasikan dan diimplementasikan di Kabupaten Pesisir Selatan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Secara garis besar,

permasalahan di BPKD Kabupaten Pesisir Selatan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Perlunya penambahan SDM di bidang akuntansi, manajemen aset daerah dan teknologi informasi yang berkinerja baik, profesional dan penuh tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Hal ini berkaitan dengan diterapkannya *accrual basis accounting* di instansi pemerintah.
2. Aspek lain yang cukup penting dari tugas pokok dan fungsi BPKD Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengelola keuangan dan juga aset daerah adalah pentingnya menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan tepat waktu dengan berbasis Aplikasi. Sehingga diharapkan Kabupaten Pesisir Selatan tetap bisa mempertahankan *Opini WTP* atau Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas LKPD pemerintah daerah. Hal kunci atau prioritas utama dalam aspek ini adalah pentingnya manajemen aset daerah/ barang milik daerah ditingkatkan kinerjanya dan harus menjadi hal yang sangat prioritas untuk dibenahi sebab bila laporan Aset lambat atau tidak valid datanya, ini sangat berpengaruh pada validitas LKPD sehingga ASET daerah merupakan hal penting yang melingkupi penyusunan LKPD atau laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dengan berbasis Aplikasi.
3. Adanya keterbatasan Dana dalam pengalokasian Anggaran oleh SKPD dalam pemenuhan pembangunan daerah kabupaten pesisir selatan.
4. Rendahnya koordinasi antar seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga akan berdampak tidak optimalnya dalam pelaporan Aset
5. Belum optimalnya pencapaian efisiensi dan efektifitas Anggaran oleh seluruh SKPD

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun
yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017**

**Tabel 1.3
Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2018**

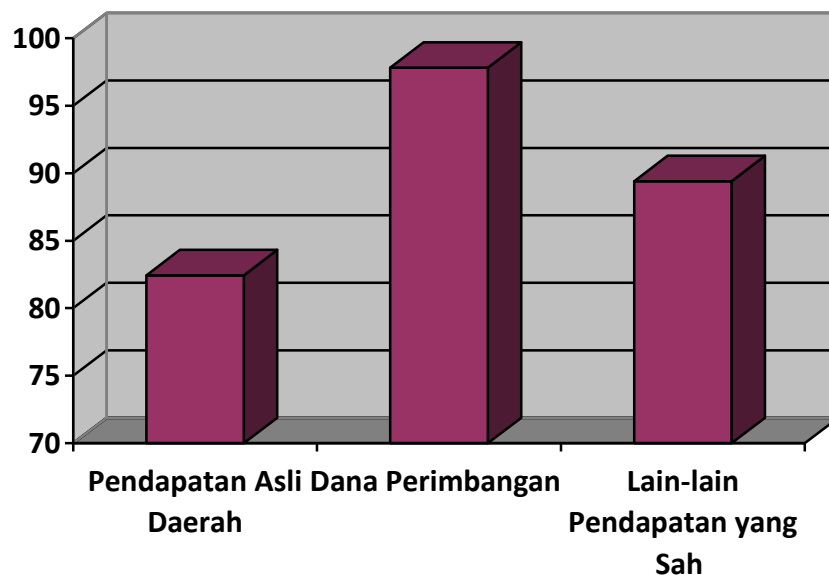
No	Uraian	Tahun		
		2018	2017	Keterangan
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.524.460.861.814,36	1.515.058.426.871,05	-

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. pada TA. 2018 Pendapatan di Anggaran Rp. 1.609.033.648.934 dan terealisasi sebesar Rp.1.524.460.861.814,36 atau yang terdiri dari :

**Tabel 1.3.1
Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah, dana
Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah TA. 2018**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
Pendapatan Asli Daerah	150.064.411.839,00	123.709.867.501,36	82,44 %
Dana Perimbangan	1.145.399.229.643,00	1.120.389.365.019,00	97,72 %
Lain-lain Pendapatan yang Sah	313.570.007.452,00	280.361.629.294,00	89,41 %

Grafik 1.3.1
Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah, dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah TA. 2018



Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas Hasil Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Target PAD TA.2018 adalah sebesar Rp.150.064.411.839,- dengan realisasi sebesar Rp. 123.709.867.501,36 atau 82,44 %.

Tabel 1.4
Laporan Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018

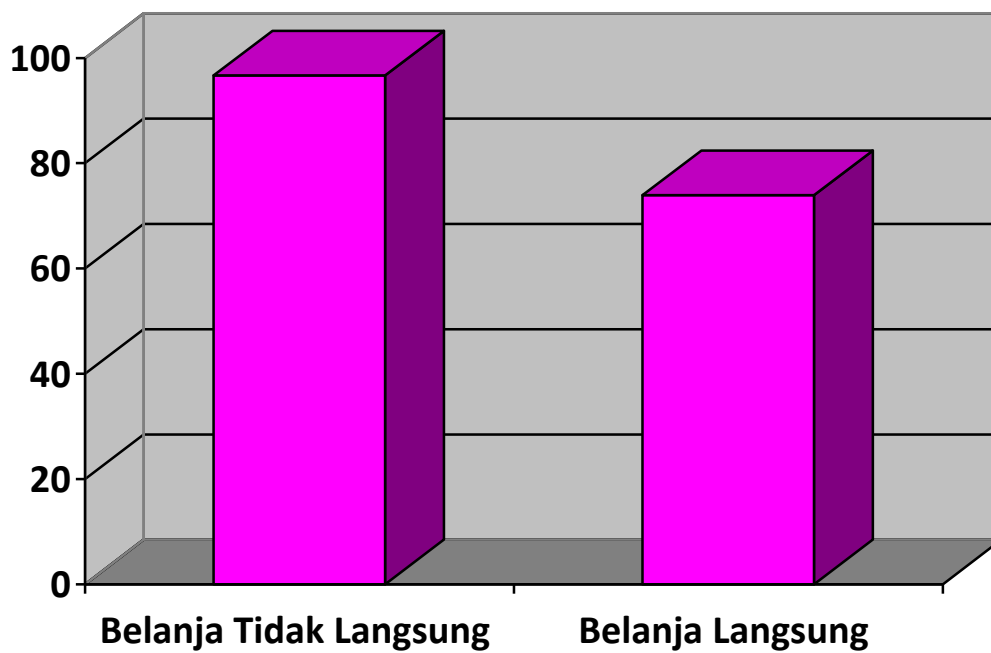
No	Uraian	Tahun		
		2018	2017	Keterangan
1.	Belanja Daerah	1.502.826.507.023,95	1.507.465.766.623,04	-

Pada TA. 2018 Belanja di Anggaran sebesar Rp. 1.737.442.460.796 dan Realisasi sebesar Rp. 1.502.826.507.023,95 atau sebesar 86,50 %, yang terdiri dari :

Tabel 1.4.1
Tabel Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Belanja Tidak Langsung	960.102.208.847,04	928.226.678.152,00	96,68 %
2.	Belanja Langsung	777.340.251.948,96	574.599.828.871,95	73,92 %

Grafik 1.4.1
Tabel Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Misi Bupati yang Didukung oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Visi Bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2016 -2021. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan diakhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Pesisir Selatan yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2021 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 adalah “**TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UMGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA** “ berdasarklan visi diatas maka ada lima Misi dalam pencapaian pembangunan yang akan diwujudkan dan Badan pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada **Misi pertama RPJMD** Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 yang berbunyi : “**MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN APARATUR YANG BERSIH DAN RESPONSIF DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT**”

Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran
Badan Pengelola Keuangan Daerah

No	Misi	Tujuan	Sasaran
	Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dengan Aparatur yang Bersih dan Responsif Dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib	1. Meningkatnya pengelolaan Keuangan Daerah dengan Baik 2. Meningkatnya tata Kelola barang Milik Daerah

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

TABEL IKU											
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018											
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Baik	1	Tanggal penyampaian RAPBD, Tanggal Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Sesuai Permendagri No.13 Tah006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Bulan Desember	Bulan Desember	Bulan Desember	Bulan Desember	Bulan Desember	Bulan Desember	Nota Kesepakatan	Bidang Anggaran
		2	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Jumlah Laporan Keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan Keuangan SKPD	Bidang BMD dan Akuntansi
2	Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	1	Jumlah SKPD yang menerapkan Pengelolaan BMD sesuai Aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan Aset SKPD	Bidang BMD dan Akuntansi
			Jumlah SKPD Lingkup pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan								

Tabel 2.3

**Perjanjian Kinerja
Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Baik	1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD 2. Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Bulan Desember 100 %
2.	Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	1. Persentase Perangkat Daerah Taat Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %

Tabel. 2.4

**Sasaran 1 (satu) pada RPJMD
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021
dan Singkronisasi dengan Tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah**

No	Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berkualitas	Penilaian LKD	WTP	WTP	100%

Tabel 2.5
Program yang mendukung Tujuan

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	866.271.159	796.893.059	91,99
2.	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	118.032.382	97.713.777	82,79
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Cpaian Kinerja dan Keuangan	177.930.626	161.089.852	90,54
4.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	118.893.022	89.453.070	75,24
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.554.233.896	1.372.504.673	88,31
6.	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/ Nagari	35.782.769	35.663.605	99,67

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Bappeda bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja >95% sampai dengan 100% = Sangat Berhasil;
- b. Capaian kinerja >80% sampai dengan 95% = Berhasil;
- c. Capaian kinerja >50% sampai dengan 80% = Cukup Berhasil;
- d. Capaian kinerja <50% = Kurang Berhasil.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis.

**3.1. Tabel
Capaian Kinerja Organisasi**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri Unggul, Agamis dan Sejahtera				
Misi	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib				
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Baik	1 Ketepatan waktu penyusunan RAPBD	Bulan desember	Bulan desember	100 %
		2 Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	1 Persentase Perangkat daerah Taat Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%

3.2. Analisa Capaian Kinerja Per Sasaran

a. Ccapaian Kinerja sasaran satu Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Baik

Tabel 3.2.1

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	1 Ketepatan waktu penyusunan RAPBD	Bulan Desember	Bulan Desember	100 %
	2 Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %	100 %

Dari table 3.2.1 diatas dapat dilihat capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategi 1 (satu) termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**

b. Capaian Kinerja sasaran dua Meningkatnya Tata Kelola Barang Milk Daerah

Tabel 3.2.2

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	1 Persentase Perangkat Daerah Taat pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	85 %	85 %

Dari table 3.2.2 diatas dapat dilihat capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 2 sebesar 85%. Pencapaian sasaran strategi 2 (dua) ini termasuk kategori **Berhasil**

c. Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu

Tabel 3.2.3

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian 2017	Capaian 2018
1	1 Ketepatan waktu penyusunan RAPBD	Bulan Desember	Bulan Desember	100 %	100 %
	2 Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %	100 %	100 %
2	1 Persentase Perangkat Daerah Taat pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	85 %

3.2.1. Faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja

Dalam Pencapaian target kinerja sasaran, terdapat factor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

1.1. Sasaran 1 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Baik

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Baik merupakan sasaran pertama Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Tujuan Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, hasil capaian kinerja sasaran satu ini sudah tercapai sesuai yang direncanakan.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.1
Tabel Sasaran 1 dan Indikator 1

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	1 Ketepatan waktu penyusunan RAPBD	Bulan Desember	Bulan Desember	100 %

Berdasarkan analisis terhadap Indikator 1 yaitu : Ketepatan waktu penyusunan RAPBD yang mana predikat ketepatan waktu penyusunan RAPBD dengan target penyampaian tepat waktu yaitu Bulan Desember sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tercapai yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 09 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 2018 Nomor 59 Tahun 2017 pada tanggal 29 Desember 2017.

Faktor Pendorong keberhasilan indikator satu ini yaitu :

1. Melakukan Koordinasi dengan seluruh Kasubag Perencanaan SKPD melalui Forum Group Discusion (FGD) untuk segera menyusun RKA SKPD sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Foto. 3.2.1.1
Forum Grpoup Discusion (FGD)

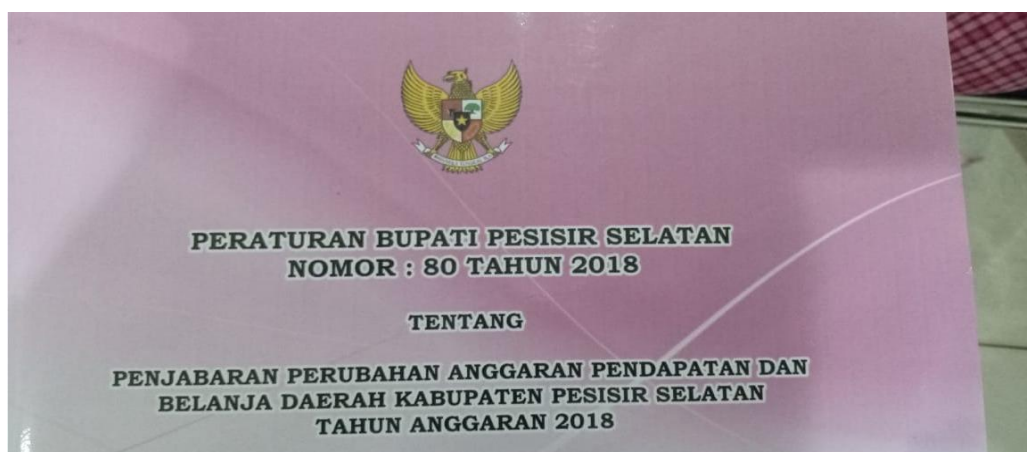


2. Melakukan Pembahasan Anggaran sesuai dengan KUA PPAS yang telah ditetapkan, pembahasan dilakukan antartara Tim Pembahasan Anggaran yang sudah di bentuk dengan SKPD yang akan di bahas, pembahasan disini akan dilihat sinkronisasi antara Kegiatan yang diajukan dengan kebutuhan Anggaran yang diperlukan dan juga dilihat Outcome atau dampak dari kegiatan tersebut, pada pembahasan ini SKPD yang dibahas harus sesuai dengan Standar Harga yang telah ditetapkan, Standar Biaya dan ASB.
3. Penyusunan RKA/DPA dengan berbasis Aplikasi SIPKD yang mana Aplikasi ini sudah terstruktur dan dapat sebagai pengendalian dalam penyusunan Anggaran oleh SKPD terhadap plafon Anggaran yang telah ditetapkan pada saat KUA PPAS.

Foto. 3.2.1.3
Aplikasi SIPKD Modul Penganggaran



4. Cetak APBD setiap bulan Desember dengan tepat waktu.



Catatan penting dalam pencapaian sasaran :

Tidak mengkomodir adanya kegiatan yang perencanaannya tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah ada di e-planing, karena hal ini akan mengakibatkan penyusunan APBD terlamabat/tidak tepat waktu.

Upaya Perbaikan

1. Diadakan Sosialisasi penyusunan APBD baik berupa sosialisasi dan surat edaran tentang prosedur dan peraturan dalam penyusunan RKA SKPD
2. Adanya Forum Group Discussion (FGD) Perencanaan yang menunjang koordinasi dan kelancaran dari seluruh SKPD Lingkup Pesisir Selatan

Tabel. 3.2.1.2
Sasaran 1 dan Indikator 2

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2.	2. Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan analisis terhadap Indikator 2 yaitu : Persentase Laporan Keuangan 45 SKPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan keuangan SKPD kemudian dikompilasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan menjadi bagian dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang mana predikat dalam penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini dengan target 100 % sudah dan terealisasi 100% atau seluruh SKPD Lingkup Kabupaten Pesisir Selatani.

Faktor Pendorong keberhasilan indikator dua ini yaitu :

1. Melakukan Rekonsiliasi setiap bulannya terhadap laporan keuangan SKPD dan laporan Aset yang mana pada saat Rekonsiliasi ini akan mencocokkan laporan Keuangan ini adalah mencocokkan Laporan Fungsional dengan BKU, LRA, dan Rekening Koran Bendahara disini akan dicocokkan antara Saldo Kas di fungsional dengan Saldo di BKU dan juga mencocokkan Saldo Rekening Koran yang ada di BKU dan Saldo Pajak Belum di Setor di BKU.

**Foto. 3.2.1.2.1
Rekonsiliasi dengan SKPD**



2. Menambah aparatur Satuan Kerja di SKPKD yang mana Aparatur yang diberdayakan ini adalah dengan latar belakang berpendidikan Akuntansi yang dapat diandalkan dalam menunjang penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Foto. 3.2.1.2.2
Aparatur Satuan Kerja SKPKD



3. Penatausahaan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan berbasis Aplikasi SIPKD yang mana Aplikasi ini sudah dipakai dalam penyusunan pertanggungjawaban SKPD dan memudahkan SKPD dalam pelaksanaan tugas

Foto. 3.2.1.2.3
Aplikasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis Aplikasi SIPKD



4. Revisi Kebijakan Akuntansi sesuai SAP dan kondisi spesifik Pemerintah Daerah.

Foto. 3.2.1.2.4
Revisi Kebijakan Akuntansi N.93 Tahun 2018



Catatan penting dalam pencapaian sasaran :

Masih kurangnya kemampuan SDM SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Upaya Perbaikan

Diadakan Bimtek terhadap PPK SKPD dalam penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

1.2. Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Baik

Meningkatnya taat Kelola Barang Milik Daerah merupakan sasaran kedua Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Tujuan Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, hasil capaian kinerja sasaran dua ini sudah tercapai sesuai yang direncanakan. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut

Tabel. 3.2.1.2
Tabel Sasaran 2 dan Indikator 1

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	1 Persentase Perangkat Daerah Taat pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	85%	85 %

Berdasarkan analisis terhadap Indikator 1 yaitu : Persentase Perangkat Daerah Taat Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mana dengan target 100 % sudah tercapai sebanyak 85% yang mana dari 45 SKPD Lingkup Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah melaksanakan penatausahaan barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebanyak 35 SKPD atau 85%.

Faktor Pendorong keberhasilan indikator satu ini yaitu :

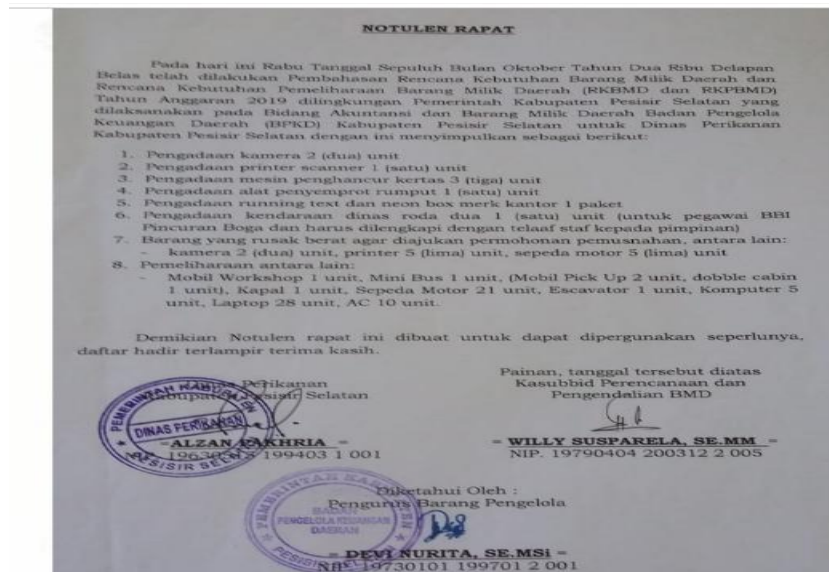
1. Melakukan Rekonsiliasi Aset setiap Triwulan dengan seluruh SKPD yaitu mencocokkan LRA- Belanja Modal dengan rekap Item Belanja Barng di SKPD dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu dokumen Pertanggungjawaban dan Pengadaan (SPK)

Foto. 3.2.1.2.1
Revisi Kebijakan Akuntansi No. 93 Tahun 2018



2. Melakukan perencanaan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan rencana Kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah setiap Tahunnya yang disesuaikan dengan perencanaan peanggaran Barang Milik Daerah dan pengendalian

Foto. 3.2.1.2.2
Notulen RKBMD dan RKPMD



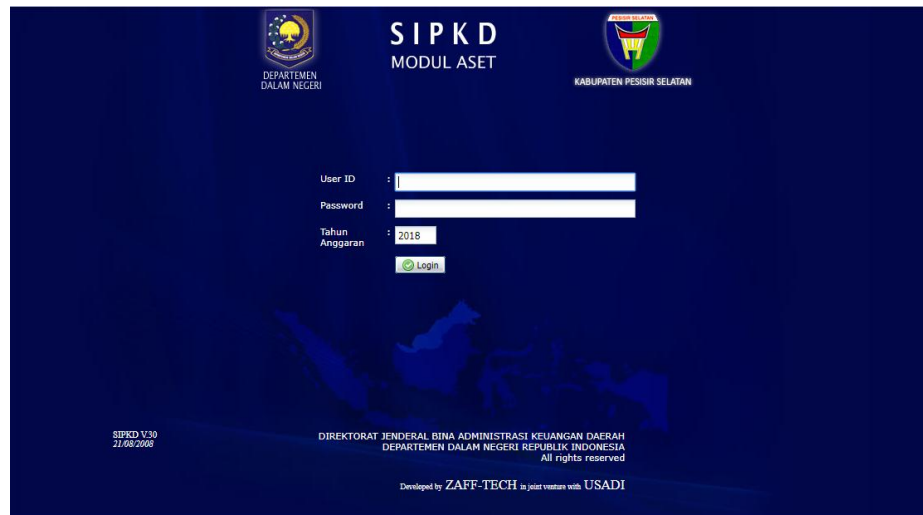
3. Melakukan cek fisik Barang Milik Daerah bagi SKPD yang akan mengusulkan penghapusan Aset sesuai dengan usulan SKPD

Foto. 3.2.1.2.3
Penghapusan Barang Inventaris yang rusak berat di RSUD M.Zain Painan



4. Penatausahaan dan Laporan Barang Milik Daerah dengan Modul SIPKD Aset yang mana pada modul ini sudah tertata penatausahaan Barang Milk Daerah sesuai dengan aturan yang ada.

Foto. 3.2.1.2.4
Aplikasi Modul Aset



Catatan penting dalam pencapaian sasaran :

1. Masih kurangnya kemampuan SDM SKPD dalam pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah sesuai aturan yang berlaku.
2. Tingginya tingkat pergantian pengurus barang SKPD yang menyebabkan kurangnya konsistensi pemahaman pengelolaan Aset dan kontinuitas pengelolaan Barang Milik Daerah

Upaya Perbaikan

Diadakan Bimtek tentang Penatausahaan tertib Administrasi Barang Milik Daerah.

a. Data- data pendukung Pencapaian Kinerja

1. Melakukan rekonsiliasi setiap bulannya dengan seluruh SKPD mengenai laporan keuangan
2. Melakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP
3. Koordinasi dan Konsultasi dengan pihak-pihak terkait

b. Prestasi yang dicapai dalam pencapaian sasaran

Prestasi yang dicapai dalam pencapaian Sasaran dan Tujuan adalah :

Penyusunan Anggaran Tepat Waktu dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP dalam tujuan yang di capai adalah OPINI BPK dalam pemeriksaan Laporan keuangan. Opini BPK yang tercapai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Dokumentasi :

fOT



A. Realisasi Anggaran

1. Tabel Sasaran , Anggaran , Realisasi dan Capaian Keuangan

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
	(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Baik	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	866.271.159	796.893.059	91,99
		Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	33.587.312	14.445.589	43,01
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	177.930.626	161.089.852	90,54
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	118,893,022	89.453.070	75,24
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.047.359.361	966.280.517	92,26

		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	84.445.070	83.268.188	98,61
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari	35.782.769	35.663.605	99,66
2	Meningkatn ya Tata Kelola Barang Milik Daerah	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	2.124.680.000	2.060.427.997	96,97
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	506,874,535	406,224,156	80,14

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada BAB III, Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 yaitu ;

1. Capaian Sasaran

Dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan, 1 (satu) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100% atau lebih, yaitu sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan nilai terendah dengan capaian 85% yaitu sasaran Meningkatnya tata kelola Barang Milik Daerah.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 2 (dua) indikator kinerja berhasil mencapai dan melampaui target dan 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target, 1 (satu) indikator belum memenuhi kriteria. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja adalah 100%.

3. Capaian Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Anggaran Belanja Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 6.933.179.221,- atau 92,50% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp. 7.494.975.341,-. Dari 2 (dua) Sasaran Strategi, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “ Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah “ yaitu 93,73% dan terendah “ Meningkatnya pengelolaan Keuangan Daerah dengan Baik “ yaitu 90,81%

B. SARAN

1. Mengadakan pelatihan dan Bimbingan teknis untuk tenaga pengelola keuangan.
2. Perlunya Optimalisasi penyusunan Laporan dan pengelolaan Aset Daerah berbasis Aplikasi
3. Perlunya Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk Pembangunan Daerah
4. Adanya peningkatan Koordinasi tentang Manajemen Aset seluruh SKPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan

5. Perlunya Kesadaran setiap ASN dalam efisiensi dan efektifitas penggunaan Anggaran

Painan, 28 Januari 2019
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KEPALA



SUHANDRI, SE.MM
Nip. 19700608 200212 1 003